

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu usaha batik khas Trenggalek yang beralamat di RT 01 RW. 01, Dukuh Jampi, Desa Ngetrong, Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek. Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek telah berdiri sejak tahun 2015. Awal mulanya usaha ini didirikan oleh sekelompok orang yang salah satunya adalah Ibu Gotin. Namun, ke tujuh temannya tidak memiliki ketekunan dalam menjalankan usaha ini, akhirnya Ibu Gotin yang meneruskan usaha batik ini dengan dibantu oleh suaminya. Motif batik dari usaha batik yang dirintis oleh Ibu Gotin dan suaminya yaitu menggunakan motif cengkeh dan motif turonggo yakso yang merupakan khas dan kebanggaan Kabupaten Trenggalek.

Dibantu oleh Dinas Komindag, Ibu Gotin mengikuti pameran di Alun-Alun Trenggalek untuk memperkenalkan batik khas Trenggalek hasil produksi usahanya. Dinas Komindag juga sering mengikutsertakan Bu Gotin dalam pameran daerah maupun luar daerah dengan tujuan untuk mengenalkan produk khas Trenggalek. Kemudian, Ibu Gotin mengambil langkah untuk mendaftarkan merek yang bernama Gotin Batik Warlami (Warna Alam Indonesia). Seiring berjalannya waktu Bu Gotin kini telah memiliki 6 karyawan. Proses pembatikan dapat dilakukan di rumah masing-

masing karyawan dengan mengambil bahan-bahan dan contoh motif di rumah Ibu Gotin.

Setelah beberapa tahun berdiri, UMKM Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah yang mengikutsertakan Gotin Batik Warlami pada setiap *event* dan pameran batik yang dilaksanakan. Selain itu, pemilik usaha melakukan promosi dari mulut ke mulut dan pengguna sosial media yang membuat usaha batik ini berkembang dengan pesat. Bahkan perkembangannya hampir sama dengan industri batik lain yang lebih dulu berdiri. Berikut merupakan peningkatan penjualan dari Industri Gotin Batik Warlami.

Tabel 1.1
Omzet Gotin Batik Warlami

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Omzet	Rp. 62.690.000	Rp. 23.895.000	Rp. 48.340.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun, seberapa pesat perkembangan yang dialami oleh Gotin Batik Warlami. Akan tetapi, pada tahun 2020, terjadi penurunan omzet penjualan yang drastis akibat dari covid-19. Walaupun demikian, usaha Gotin Batik Warlami mampu bangkit kembali. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan pada Tahun 2021 yang meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan Tahun 2020. Kemajuan ini juga tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Trenggalek yang selalu mendukung usaha kecil

yang dimiliki oleh masyarakatnya seperti memfasilitasi para pengrajin batik untuk mengikuti *fashion show* di kancah nasional maupun internasional, mengadakan pameran batik di berbagai daerah, mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, dan juga pemerintah mewajibkan seluruh pegawainya untuk memakai batik khas Trenggalek sebagai seragam kerja. Sehingga batik khas Trenggalek mampu bersaing dengan batik batik yang sudah terkenal seperti batik solo dan batik pekalongan.

Kemajuan dan perkembangan UMKM Gotin Batik Warlami, tidak memberikan jaminan kepada UMKM untuk tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Gotin Batik Warlami. Pertama, permasalahan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan karena pelaku UMKM masih merasa kesulitan akibat kurangnya pemahaman terkait pembukuan atau akuntansi serta standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kedua, permasalahan yang terkait dengan permodalan, karena para pelaku UMKM sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan akibat kurang memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu laporan keuangan. Konsekuensinya adalah kurangnya kepercayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank terhadap kemampuan pengembalian kredit dilihat dari informasi keuangan yang dianggap kurang reliabilitas sehingga menghambat aksesibilitas kredit. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi yang semakin maju. Hal ini dapat disebabkan tidak adanya sumber daya manusia di UMKM Gotin Batik Warlami yang mahir akan teknologi sekarang.

Keempat, permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa dalam UMKM. Meski UMKM Gotin Batik Warlami telah menjual produknya secara online melalui media sosial atau market place, pemahaman tentang pemasaran digital masih belum maksimal sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun masih belum optimal. Kelima, pembelian bahan baku, sering terjadi kehabisan stok barang di tempat langganan sehingga mencari tempat lain yang berbeda dengan harga yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu ciri khas tiap daerah, batik juga merupakan salah satu kebanggaan Indonesia. Batik merupakan karya seni secara turun-temurun. Batik Trenggalek termasuk industri kecil yang banyak berkembang di daerah Trenggalek, misalnya di Desa Ngetrong, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek. Industri batik di Trenggalek menjadi salah satu penopang ekonomi sebagian kecil masyarakat. Adanya industri batik tersebut, dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran dan berperan sebagai pelestari budaya Indonesia.

Salah satu akses yang sangat penting dalam kelangsungan suatu usaha terutama UMKM ialah akses ke lembaga keuangan, karena dengan akses tersebut UMKM mendapat bantuan Dana dari lembaga keuangan sehingga dapat terus mengembangkan usahanya. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai syarat peminjaman modal dan bahan analisis untuk menilai kemampuan dari UMKM dalam pelunasan kredit guna meminimalkan risiko gagal bayar. Selain dijadikan syarat peminjaman modal, menurut PSAK

No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai informasi dan evaluasi kinerja perusahaan.¹ Laporan keuangan juga dapat membantu pelaku UMKM untuk mengukur tingkat keberhasilan usahanya dan paling tidak untuk mengetahui laba atau rugi dari kegiatan usaha yang dijalankan. Jadi, Pelaku UMKM dapat menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan, laba rugi dan dapat melakukan efisiensi biaya. Akan tetapi, pengelolaan keuangan seringkali diabaikan oleh para pelaku UMKM.

Laporan keuangan diharapkan dimiliki oleh setiap usaha. Laporan keuangan sangat berguna untuk menganalisis kinerja keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, arus kas dan kinerja usaha yang memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan, seperti untuk membuat keputusan ekonomi dan menyajikan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan. Hasil wawancara kepada pemilik UMKM Gotin Batik Warlami menunjukkan bahwa pemilik belum memiliki laporan keuangan sama sekali ataupun pembukuan akuntansi. Padahal, terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembukuan kegiatan usaha.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 49 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan bahwa “Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam

¹ Dewan Standar Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009)*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009), hal. 5

pasal 48, pemegang Izin Usaha wajib menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha, menyusun pembukuan kegiatan usaha, dan melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.² Maksud dari “pembukuan kegiatan usaha” yaitu laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha.

Usaha ditetapkan sebagai UMKM harus memiliki persyaratan atau kriteria UMKM yang mana telah diatur oleh UU Pasal 6 No. 20 Tahun 2008 mengenai kriteria UMKM pada modal atau kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan dan omzetnya, yaitu:³ 1) Persyaratan usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000.000 dan tidak didalamnya tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan yang dimiliki kurang dari atau sama dengan Rp. 300.000.000. 2) Persyaratan usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 dan paling banyak sampai Rp. 500.000.000 dan tidak didalamnya tanah dan bangunan yang menjadi tempat usaha. Hasil penjualan tahunan yang dimiliki lebih dari Rp. 300.000.000 dan paling banyak sampai Rp. 2.500.000.000. 3) Persyaratan Usaha Menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 dan paling banyak sampai Rp. 10.000.000.000 dan tidak didalamnya tanah dan bangunan yang

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/17TAHUN2013PP.HTM>, diakses 23 Januari 2022

³ Nasroen Yasabari, Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hal. 81

menjadi tempat usaha. Hasil penjualan tahunan yang dimiliki lebih dari Rp. 2.500.000.000 dan paling banyak sampai Rp. 50.000.0000.000.

Melihat pentingnya UMKM di Indonesia, pemerintah melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang dinilai dapat memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memahami penyusunan laporan keuangan serta pentingnya standardisasi laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan SAK EMKM pada 24 Oktober 2016 serta berlaku pada 1 Januari 2018.⁴ Tujuan dari SAK EMKM ini adalah guna standardisasi laporan keuangan UMKM dan menjadi jawaban untuk UMKM akan pelaksanaan menerapkan standar sebelumnya yang dianggap menyulitkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM diterapkan pada entitas tanpa akuntabilitas publik dan belum menerbitkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal yang telah mencukupi standar entitas mikro, kecil, dan menengah.⁵

SAK EMKM dapat digunakan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat untuk pengguna. Selain itu, juga dapat menyusun laporan keuangan sehingga bisa mengevaluasi usahanya dan menggunakan informasi yang ada di dalam laporan keuangan

⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, "SAK EMKM Literasi Akuntansi Untuk UMKM di Indonesia", dalam <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1270-sak-emkm-literasi-akuntansi-untuk-umkm-di-indonesia>, diakses 24 Januari 2022

⁵ Ibid.

sebagai dasar pengambilan keputusan.⁶ Pengguna yang dimaksud merupakan pemilik, manajer, kreditur ataupun investor yang menjadi penyedia sumber daya untuk entitas tersebut. SAK EMKM diharapkan menjadi salah satu pendorong literasi untuk UMKM di Indonesia yang membuat akses pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya semakin luas. Para pelaku UMKM diharapkan menggunakan SAK EMKM untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan guna mengembangkan usahanya.

Penerbitan SAK EMKM yang bertujuan untuk mendukung kemajuan dan perkembangan sektor UMKM, seharusnya SAK EMKM dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, perlu bagi UMKM mempersiapkan diri untuk menerapkan standar akuntansi EMKM pada laporan keuangan UMKM. Beberapa hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa terdapat UMKM yang belum siap untuk menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini dapat disebabkan karena kepemilikan UMKM biasanya merupakan usaha perorangan sehingga pembuatan laporan keuangan kurang dibutuhkan. Selain itu, alasan dari pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan adalah sebagian pelaku UMKM menganggap bahwa akuntansi ataupun laporan keuangan tidak penting dan wajib diterapkan pada UMKM. Para pelaku UMKM juga beranggapan bahwa akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap usaha yang dijalkannya. Walaupun SAK EMKM dinyatakan

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: IAI, 2016), hal. 3

lebih sederhana dan lebih mudah penerapannya dibandingkan dengan SAK Umum dan SAK ETAP, tidaklah semudah yang dikatakan karena untuk menerapkan SAK EMKM dalam proses pelaporan keuangan tentunya memerlukan pemahaman dan kesiapan yang cukup bagi pelaku UMKM.

Penelitian terkait dengan kesiapan implementasi SAK EMKM pada UMKM telah banyak dilakukan dengan berbagai metode dan indikator yang berbeda-beda. Walaupun demikian, penelitian tentang kesiapan implementasi SAK EMKM pada UMKM harus terus dilakukan dan diperhatikan agar lebih maksimal. Kesuksesan implementasi SAK EMKM merupakan perjalanan yang panjang dan membutuhkan kesiapan dari pelaku atau pengelola UMKM. Tingkat kesiapan implementasi SAK EMKM yaitu sejauh mana pelaku UMKM telah bersedia dalam mengimplementasikan SAK EMKM pada usahanya. Keuntungan UMKM terhadap kesiapan dalam pengimplementasian SAK EMKM yaitu dapat menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan khususnya bagi UMKM yang belum bisa membuat laporan keuangan. Selain itu, UMKM mendapat keuntungan apabila laporan keuangannya yang semakin baik dan telah berdasarkan standar. Misalnya, apabila UMKM memerlukan investasi ataupun pendanaan modal terhadap usahanya, investor atau kreditur dapat mempertimbangkan laporan keuangannya.

Kesiapan pengelola UMKM dalam implementasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM sangat perlu untuk dilakukan sehingga dapat dilihat seberapa prospek perbaikan kualitas laporan keuangan guna kelangsungan

usaha dan apakah pembentukan dan pengesahan SAK EMKM ini dapat benar-benar mencapai tujuan utamanya yaitu penyelenggaraan sistem akuntansi yang lebih baik namun sederhana bagi entitas mikro, kecil dan menengah. Selain itu, dapat mengetahui di mana letak kemampuan dan keterbatasan para pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan secara berkala dan terus menerus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penilaian kesiapan UMKM dalam implementasi standar akuntansi keuangan ini dapat dijadikan acuan DSAK IAI untuk menilai langkah apa yang harus dilaksanakan agar dapat meningkatkan kesiapan para pelaku UMKM untuk implementasi SAK EMKM.

Pada penelitian ini, penilaian kesiapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dinilai dengan tiga indikator, yaitu dari sumber daya manusia, ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung, serta keuangan UMKM. Dalam mengelola keuangan, UMKM membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan paham mengenai akuntansi, baik pencatatan, pembukuan ataupun laporan keuangan. Agar mempermudah UMKM mengimplementasikan SAK EMKM, ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung diperlukan. Selain itu, pengelolaan usaha yang baik dapat dilihat dari pengelolaan keuangannya.

Sumber daya manusia UMKM dapat dinilai kualitasnya melalui beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, ada atau tidaknya karyawan di bidang pencatatan, pemahaman dan kemampuan akuntansi, dan pelatihan/

training di bidang akuntansi. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada perkembangan usaha adalah tingkat pendidikan pemilik maupun karyawan. Semakin tinggi tingkat pendidikan sumber daya manusia yang ada di UMKM, maka semakin terbuka pemikiran yang berkaitan dengan usahanya, dan memberikan pengaruh terhadap tanggapan pemilik dengan adanya standar akuntansi keuangan khususnya SAK EMKM apabila semakin tinggi tingkat pendidikannya.

Karyawan yang bertugas dalam pencatatan/pembukuan juga diperlukan bagi UMKM yang mempersiapkan diri dalam pembukuan atas kegiatan usahanya. Adanya karyawan yang bertugas dalam pencatatan dapat dimungkinkan penerapan standar akuntansi keuangan khususnya SAK EMKM pada UMKM tersebut. Pemahaman SAK EMKM juga menjadi salah satu faktor untuk mengoptimalkan implementasi SAK EMKM. Oleh karena itu, UMKM perlu lebih memahami dan siap atas penerbitan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Pemahaman dan kemampuan akuntansi sangat diperlukan bagi para pelaku usaha, agar memudahkan pelaku usaha dalam membuat pembukuan dalam usahanya sehingga dapat menunjang usaha menjadi lebih baik.

Laporan keuangan juga digunakan untuk melakukan analisis untuk membuat keputusan finansial dan mempertanggungjawabkan manajemen pada penggunaan sumber daya di dalam usahanya. Tetapi nyatanya, penyusunan laporan keuangan tidak mudah untuk sebagian pelaku UMKM. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan terkait cara penyusunan

laporan keuangan yang benar. Beberapa pelaku UMKM belum melakukan pemisahan dana pribadi dengan keuangan usahanya. Selain itu, dibutuhkan pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila UMKM dipaksa dalam penyusunan laporan keuangan maka bisa saja laporan keuangan yang sudah dibuat tidak bisa dipercaya serta digunakan dalam pengambilan keputusan.

Maka dari itu, perlu perhatian yang lebih dari pemerintah seperti pelatihan dan diikuti dengan pendampingan kepada pelaku UMKM tentang kesadaran pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan yang berlaku pada usahanya. Pada saat ini, UMKM hanya memikirkan bagaimana mendapatkan banyak pembeli. Jadi, kondisi seperti ini harus diimbangi dengan pemahaman akuntansi dan manfaat akuntansi pada suatu usaha.

Sarana dan prasarana yang mendukung juga diperlukan untuk menilai kesiapan implementasi SAK EMKM. Untuk menunjang keberhasilan dalam mengimplementasikan SAK EMKM maka UMKM diharapkan memiliki ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung yang memadai. Pemanfaatan sarana pendukung yang tepat memungkinkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kinerjanya, selain itu UMKM akan mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Terdapat empat bagian sarana pendukung pada penelitian ini yaitu komputer, alat tulis kantor (ATK), bukti transaksi, dan otorisasi transaksi.

Kesiapan UMKM untuk implementasi SAK EMKM juga dinilai dari segi keuangannya. Apabila UMKM mampu dalam keuangan maka UMKM tersebut lebih mudah untuk mengimplementasikan SAK EMKM pada laporan keuangan usahanya. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menilai kesiapan UMKM dalam implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah adalah kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba, terdapat atau tidaknya alokasi gaji untuk pegawai di bidang akuntansi, mungkin atau tidak menggunakan jasa pihak ke tiga dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan tujuan dan harapan dari penerbitan SAK EMKM oleh Ikatan Standar Akuntansi Indonesia, maka peneliti tertarik meneliti mengenai kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM guna menunjang dan mengembangkan usahanya. Peneliti tertarik mengambil objek penelitian UMKM Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek karena perkembangannya yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan terlihat besarnya perhatian pemerintah kota dalam mendorong keberhasilan UMKM tersebut. Oleh karena itu, penulis memberi judul penelitian ini **“Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kesiapan Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dilihat dari sumber daya manusia?
2. Bagaimana kesiapan Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dilihat dari sarana pendukung?
3. Bagaimana kesiapan Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dilihat dari sisi keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dalam penelitiannya, yakni:

1. Untuk mengetahui kesiapan Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dilihat dari sumber daya manusia.
2. Untuk mengetahui kesiapan Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dilihat dari sarana pendukung.

1. Untuk mengetahui kesiapan Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dilihat dari sisi keuangan

D. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini tetap terarah dan tidak keluar dari tujuan penelitian, oleh karena itu diterapkan batasan masalah, yaitu:

1. Objek penelitian yang ditetapkan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Gotin Batik Warlami, Dusun Jampi, RT. 01 RW. 01, Desa Ngentrong, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek.
2. Hanya sebatas melakukan penelitian di UMKM Gotin Batik Warlami Kabupaten Trenggalek terkait dengan pencatatan keuangan dan kesiapan implementasi SAK EMKM.
3. Menggunakan data primer. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan narasumber secara langsung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan pada hasil penelitian ini yaitu baik berupa disiplin teoritis ataupun praktis, seperti yang telah dijelaskan pada tujuan penelitian di atas. Berikut kegunaan atas penelitian yang dilaksanakan peneliti:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Akuntansi Syariah khususnya dalam hal pembukuan atau implementasi SAK EMKM

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian memberikan peningkatan kapasitas dan pengalaman peneliti berkaitan dengan menyusun laporan keuangan melalui implementasi SAK EMKM

- b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat menambah pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang akuntansi khususnya terkait implementasi SAK EMKM dalam penyajian laporan keuangan serta bahan masukan untuk UMKM agar lebih memperhatikan laporan keuangannya, baik dalam penyusunan maupun meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengimplementasikan SAK EMKM

- c. Bagi Instansi

Diharapkan hasil riset peneliti dijadikan topik penelitian, menambah bahan literatur dan wawasan serta pengetahuan bagi penelitian selanjutnya mengenai sistem akuntansi keuangan di Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

d. Bagi DSAK IAI

Diharapkan penelitian ini menjadikan acuan atau rujukan DSAK IAI guna melihat pemahaman dan kesiapan UMKM untuk mengimplementasikan SAK EMKM sebagai dasar pelaporan keuangan UMKM. Sehingga DSAK IAI dapat menentukan langkah apa yang dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesiapan pelaku UMKM untuk mengimplementasikan SAK EMKM.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai dasar pembanding, bahan rujukan, serta referensi untuk peneliti selanjutnya.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini diperlukannya penegasan istilah guna menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dan kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman dalam penelitian ini. Penegasan istilah dapat memberikan batasan istilah dan menjelaskan definisi yang tepat baik secara konseptual maupun operasional, yaitu:

1. Definisi konseptual

a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

UU No. 20 Tahun 2008 telah memberikan definisi UMKM, yaitu:⁷

- 1) Usaha Mikro merupakan suatu usaha yang produktif dan memenuhi persyaratan Usaha Mikro seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang. Usaha Mikro merupakan milik perseorangan ataupun badan usaha perseorangan.
- 2) Usaha Kecil yakni usaha yang produktif dan memenuhi persyaratan sebagai Usaha Kecil yang telah di tegaskan pada UU. Usaha Kecil yakni usaha yang dimiliki perseorangan atau badan usaha dengan catatan tidak bagian dari cabang perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan juga bukan merupakan bagian dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar yang telah memiliki standar Usaha Kecil seperti dijelaskan pada Undang-Undang.
- 3) Usaha Menengah yakni usaha produktif mandiri, serta dikelola oleh perseorangan maupun badan usaha dengan catatan tidak menjadi bagian dari cabang/anak usaha suatu perusahaan, diambil alih, maupun anggota langsung/tidak dari Usaha Kecil maupun Usaha Besar seperti ditegaskan pada Undang-Undang.

b. Standar Akuntansi Keuangan.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, dalam <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>, diakses 13 Oktober 2020

Standar Akuntansi Keuangan merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.⁸

- c. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah
Guna memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah maka disusunlah SAK EMKM. Standar ini diperuntukkan bagi entitas yang belum atau tidak mampu dalam memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur pada SAK ETAP.⁹

2. Penegasan Operasional

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM yakni usaha produktif serta dipunyai oleh perseorangan atau badan usaha yang telah melengkapai atau mencukupi persyaratan usaha tertentu sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

- b. Standar Akuntansi Keuangan

Suatu kerangka konseptual yang memberikan pedoman kepada siapapun guna menyusun laporan keuangan sehingga diterima umum.

- c. Standar Akuntansi Keuangan EMKM

⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”, dalam <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>, diakses 29 Maret 2021

⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)”, dalam <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/emkm>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022

Standar akuntansi yang diperuntukkan oleh entitas yang belum atau tidak mampu dalam mengimplementasikan SAK ETAP. SAK EMKM dibuat sederhana agar dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah, sehingga diharapkan UMKM dapat melakukan penyusunan laporan keuangan dengan baik dan akuntabilitas guna pengambilan keputusan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, materi-materi yang termuat dalam penelitian dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian Awal, terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.
2. Bagian Utama, terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) batasan masalah, e) manfaat penelitian, f) penegasan istilah, g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari: a) kajian fokus pertama, b) kajian fokus kedua dan seterusnya, c) hasil penelitian terdahulu, d) kerangka berpikir teoritis.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari: a) pendekatan dan jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) data dan sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknik analisis data, dan g) pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: a) paparan data, dan b) temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI : Penutup

Terdiri dari: a) kesimpulan dan b) saran.

3. Bagian Akhir, terdiri dari: a) daftar pustaka, b) lampiran-lampiran, c) surat pernyataan skripsi dan d) daftar riwayat hidup peneliti.